

STRATEGI PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA WISATA TIMBRAH KECAMATAN KARANGASEM KABUPATEN KARANGASEM

oleh:

Dewa Putu Oka Prasiasa¹

Abstrak

Kehadiran Desa Wisata Timbrah sebagai produk wisata alternatif dipandang tepat untuk memenuhi perubahan pola konsumsi wisatawan. Penelitian ini mengkaji strategi penguatan kelembagaan, strategi kemitraan serta merumuskan bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penguatan kelembagaan, Desa Wisata Timbrah perlu melibatkan pranata sosial kemasyarakatan dalam manajemen operasional untuk mempertahankan eksistensi Desa Timbrah sebagai desa wisata berbasis budaya. Strategi kemitraan dapat dilakukan dengan mengembangkan kemitraan formal melalui program kemitraan antara masing-masing mitra (masyarakat Desa Timbrah, Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem, Pengusaha dari Desa Timbrah). Bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat antara lain sebagai pembuat makanan/minuman tradisional, pembuat kerajinan lokal, pemandu tracking, petugas pengaman, *mejejahitan*, pelatih tabuh dan tari, pembuat kerajinan lokal, pengelola *homestay*, dan pemandu wisata lokal.

Kata kunci: strategi, pengembangan, pemberdayaan, desa wisata

Abstract

The presence of Timbrah Tourism Village as alternative tourism products was seen right to meet changes in consumption patterns. This research examines the strategy of institutional strengthening, strategy partnerships and formulate the forms of community empowerment. The results showed that the strategy of institutional strengthening of Timbrah Tourism Village, need

¹ STIMI Handayani Denpasar

to involve civic social institution in the operational management to maintain the existence of Timbrah Tourism Village as a tourism village-based on culture. The strategy of the partnership can be done by developing formal partnerships through the partnership program between each of the partners (communities of Timbrah Village, Government of Karangasem Regency, entrepreneurs from Timbrah Village). Other forms of community empowerment among others as a maker of traditional food/beverages, the maker of local handicrafts, guide of trekking, safeguard, mejejahitan, coach of gamelan and dance, managed of homestay and local tour guides.

Keywords: *strategy, development, empowerment, tourism village.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam satu dekade terakhir, perkembangan tren perjalanan wisatawan ditandai dengan munculnya motivasi dan pola perjalanan wisata baru yang dilakukan oleh wisatawan, khususnya pada segmen pasar wisatawan yang sudah berpengalaman (*mature market*), dan yang berpendidikan serta memiliki tingkat kepedulian yang tinggi terhadap isu-isu terkini seperti konservasi lingkungan, pariwisata berkelanjutan, pariwisata berbasis masyarakat, serta budaya lokal. Perubahan yang dimaksud adalah terjadinya kecenderungan pola perjalanan dari wisata massal (*mass tourism*) ke arah wisata alternatif (*alternative tourism*). Wisata alternatif merupakan bentuk penyeimbang terhadap perkembangan wisata massal yang begitu pesat dan dipandang kurang ramah terhadap lingkungan serta kurang berpihak kepada komunitas lokal.

Perubahan pola perjalanan wisatawan tersebut secara otomatis mendorong pola konsumsi wisatawan (*customer behaviour pattern*) terhadap produk wisata atau destinasi pariwisata yang tidak lagi fokus pada 3S (*sun, sea, dan sand*) atau destinasi wisata yang populer, namun berkembang lebih luas pada beragam jenis kegiatan wisata yang berorientasi pada pengenalan terhadap alam atau budaya lokal dengan motivasi untuk pengayaan wawasan, pengembangan diri serta aktualisasi diri, dengan bentuk-bentuk wisata petualangan seperti hiking, trekking, wisata minat khusus (*bird watching, wild life viewing*), wisata budaya dan desa wisata (*tourism village*). Desa wisata secara internasional dikenal dengan berbagai istilahnya seperti *village tourism, rural tourism, farm tourism*, atau *agro tourism* (Leu, 1992:212; Naisbit, 1994:137; Dolores, 1995:49; Iakovidou, 1995:87; Oppermann, 1996:212; Dowling, 1996:220) telah banyak dilaksanakan di berbagai negara, seperti di Swiss, Kenya, Senegal, Yunani, Jerman, dan Muangthai.

Upaya pengembangan wisata alternatif berupa desa wisata yang sesuai dengan karakteristik desa merupakan langkah tepat dalam mengantisipasi peningkatan kunjungan wisatawan dan

kemungkinan kejenuhan terhadap produk-produk wisata yang sudah ada. Pengembangan desa wisata juga dapat memberikan sejumlah peluang bagi pemberdayaan potensi-potensi daya tarik wisata yang ada di desa dengan keunikan dan otentisitasnya untuk dapat dikemas dan dikembangkan sekaligus dapat meningkatkan keberdayaan masyarakat desa melalui kegiatan ekonomi pariwisata yang tumbuh dan berkembang.

Pengembangan desa wisata (*tourism village*) merupakan salah satu alternatif yang dipandang sangat strategis untuk menjawab sejumlah isu global dan nasional terkait dengan pariwisata seperti konservasi lingkungan, pariwisata berkelanjutan, pariwisata berbasis masyarakat, komunitas, serta budaya lokal tersebut. Menurut Kemenparekraf (2016:7) nilai manfaat yang dapat dicapai dari pengembangan desa wisata adalah: *satu*, melalui pengembangan desa wisata, maka suatu destinasi pariwisata akan memiliki keragaman atau diversifikasi produk yang akan membuka peluang kunjungan ulang bagi wisatawan yang pernah berkunjung ke daerah atau destinasi tersebut; *dua*, pengembangan desa wisata juga dianggap mampu meminimalkan potensi urbanisasi masyarakat dari pedesaan ke perkotaan dikarenakan mampu menciptakan aktivitas ekonomi di wilayah pedesaan yang berbasis pada kegiatan pariwisata (ekonomi pariwisata). Daya produktif potensi lokal termasuk didalamnya adalah potensi-potensi wilayah pedesaan akan dapat didorong untuk tumbuh dan berkembang dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh desa, sehingga akan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendorong pengembangan bidang sosial budaya dan ekonomi masyarakat pedesaan; *tiga*, lebih lanjut akan dapat didorong berbagai upaya untuk melestarikan dan memberdayakan potensi keunikan berupa budaya lokal dan nilai-nilai kearifan lokal (*local wisdom*) yang ada di masyarakat yang cenderung mengalami ancaman kepunahan akibat arus globalisasi yang sangat gencar dan telah memasuki wilayah pedesaan. Pelestarian sumber daya budaya, kearifan lokal serta sumber daya alam pedesaan (al. bentang alam, persawahan, sungai, danau) yang secara nyata akan membantu mereduksi pemanasan global.

Atas dasar pemikiran tersebut, Tahun 2015-2018 Pemerintah Daerah Provinsi Bali melalui Program Bali Mandara Jilid II mencanangkan pembentukan 100 desa wisata yang tersebar pada 8 kabupaten dan 1 kotamadya. Seratus desa wisata tersebut penyebarannya masing-masing 22 desa wisata di Kabupaten Buleleng, 6 desa wisata di Kabupaten Jembrana, 16 desa wisata di Kabupaten Tabanan, 5 desa wisata di Kabupaten Badung, 15 desa wisata di Kabupaten Gianyar, 10 desa wisata di Kabupaten Klungkung, 11 desa wisata di Kabupaten Bangli, 10 desa wisata di Kabupaten Karangasem, dan 5 desa wisata di Kotamadya Denpasar. Desa Wisata Timbrah adalah salah satu dari 10 desa wisata yang dikembangkan di Kabupaten Karangasem melalui Program Bali Mandara Jilid II, sedangkan sembilan lainnya adalah desa wisata Budekeling, Sibetan, Tenganan, Prangsari, Iseh, Antiga, Jasri, Besakih, dan Munti Gunung.

Sejak ditetapkan sebagai desa wisata, dalam operasionalnya Desa Wisata Timbrah belum menunjukkan hasil yang sesuai dengan harapan pengembangan desa tersebut sebagai desa wisata, baik dari segi kelembagaan (*ancillary*), kerjasama dengan *stakeholders* pariwisata, maupun pemberdayaan masyarakat dalam operasional desa wisata.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada Latar Belakang, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut. (1) Strategi apa sajakah yang dapat diterapkan dalam mendukung pengembangan Desa Timbrah sebagai desa wisata?. (2) Bentuk-bentuk pemberdayaan apa saja yang dapat dilakukan untuk mendukung pengembangan Desa Timbrah sebagai desa wisata.

C. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengembangan desa wisata sebagai salah satu bentuk wisata alternatif yang akhir-akhir ini banyak mendapat perhatian sebagai salah satu lokomotif penggerak perekonomian dari desa. Sedangkan secara khusus penelitian ini bertujuan untuk (1) merumuskan strategi yang dapat diterapkan dalam mendukung pengembangan Desa Timbrah sebagai desa wisata, dan (2) menginterpretasi dan merumuskan bentuk-bentuk pemberdayaan yang dapat dilakukan untuk mendukung pengembangan Desa Timbrah sebagai desa wisata.

II. TELAAH PUSTAKA

A. Kajian Pustaka

Sebagai sebuah kajian pustaka, ada lima hasil penelitian yang disajikan. Penelitian tersebut antara lain penelitian Bashar dan Ajloni (2012), Chiu et al. (2016), Rajaratnam dan Nair (2015), Chang dan Tsai (2016), dan Akhoondnejad (2016). Adapun uraian kelima hasil penelitian tersebut seperti berikut.

Penelitian tentang "*Motivating Foreign Tourists to Visit The Rural Site in Jordan, Village of Petra*" yang ditulis oleh Bashar dan Ajloni (2012). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui motivasi utama (faktor) yang menarik wisatawan asing untuk mengunjungi situs pedesaan di Petra, Yordania. Temuan dari penelitian ini adalah lingkungan pedesaan yang difasilitasi dengan baik merupakan faktor motivasi utama untuk mengunjungi Petra. Oleh karena itu, untuk memberikan pengalaman penting merevitalisasi program serta strategi sangat diperlukan termasuk analisis segmentasi pasar, untuk meningkatkan dampak sosial dan ekonomi.

Penelitian tentang *"The influence of Destination Image and Tourist Satisfaction on Tourist Loyalty: A Case Study of Chinese Tourists in Korea"* yang ditulis oleh Chiu, et al. (2016), bertujuan untuk mengeksplorasi *image* kognitif dan afektif dan memeriksa pengaruh *image* destinasi melalui kedua aspek pada tingkat kepuasan dan loyalitas wisatawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *image* kognitif memiliki pengaruh langsung pada *image* afektif dan mengkonfirmasi proses pembentukan *image* destinasi. *Image* kognitif dan afektif gambar berpengaruh positif pada kepuasan, dan pada gilirannya, kepuasan meramalkan loyalitas wisatawan. Selain itu, hubungan antara *image* destinasi dan loyalitas mengungkapkan bahwa *image* afektif memiliki pengaruh langsung terhadap loyalitas wisatawan. Meskipun *image* kognitif menunjukkan tidak ada hubungan langsung terhadap loyalitas wisatawan, penelitian ini menemukan bahwa *image* kognitif tidak langsung mempengaruhi loyalitas wisatawan melalui *image* afektif dan kepuasan.

Penelitian Rajaratnam dan Nair (2015) mengenai *"Destination Quality and Tourists' Behavioural Intentions: Rural Tourist Destinations in Malaysia"*. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh langsung kualitas destinasi yang dirasakan terhadap niat perilaku wisatawan dan efek tidak langsung melalui kepuasan, dalam konteks pariwisata pedesaan di Malaysia. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji karakteristik sosio-demografis wisatawan (misalnya kunjungan sebelumnya, jenis wisata, dan lain-lain) mempengaruhi persepsi mereka pada kualitas destinasi, kepuasan dan niat perilaku. Hasil penelitian ini mengungkapkan terdapat delapan atribut utama yaitu fasilitas, aksesibilitas, logistik, pengalaman, kebersihan, informasi, keamanan, dan keramahan yang memberikan kontribusi terhadap kualitas destinasi. Kualitas destinasi yang dirasakan secara signifikan mempengaruhi kepuasan yang pada gilirannya secara signifikan mempengaruhi niat perilaku.

Chang dan Tsai (2016) pada penelitiannya mengenai *"Influences of The Cultural Implications and Tourism Attractiveness of Festival Tourism on Tourist"*, mengkaji implikasi budaya dan integrasi budaya sebagai faktor utama yang mempengaruhi daya tarik pariwisata, diikuti oleh budaya dan karakteristik. Selain itu penelitian ini juga mengkaji aspek pendidikan yang dimasukkan ke dalam acara festival dan pengaruhnya terhadap daya tarik pariwisata, serta secara komprehensif mengkaji fungsi dan kegiatan festival yang memungkinkan wisatawan untuk bersantai dan mendapatkan pengalaman baru yang dapat mempengaruhi loyalitas wisatawan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implikasi budaya dan integrasi budaya adalah faktor utama yang mempengaruhi daya tarik pariwisata, diikuti oleh budaya dan karakteristik. Secara komprehensif fungsi dan kegiatan pada acara festival memungkinkan wisatawan untuk bersantai dan mendapatkan pengalaman baru yang dapat mempengaruhi loyalitas wisatawan.

Akhoondnejad (2016) dalam penelitiannya tentang *"Tourist Loyalty to a Local Cultural Event: the Case of Turkmen Handicrafts Festival"* mengutip beberapa konsep tentang kepercayaan.

Tujuan penelitian yang dilakukan oleh Akhoondnejad (2016) yaitu mengkaji model secara menyeluruh mengenai loyalitas kehadiran pada festival lokal. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa autensitas yang dirasakan mempengaruhi persepsi terhadap kualitas, nilai, dan kepuasan. Kualitas berpengaruh langsung terhadap nilai, kepuasan, dan kepercayaan. Nilai yang dirasakan berpengaruh terhadap kepuasan, kepercayaan, dan kualitas. Kepuasan berpengaruh langsung pada loyalitas dan kepercayaan.

B. Konsep

Dalam penelitian ini dipergunakan tiga konsep, yaitu konsep pengembangan, konsep pemberdayaan, dan konsep desa wisata. Adapun uraiannya sebagai berikut.

1. Pengembangan

Kata pengembangan dapat dikaitkan dengan dua hal, yaitu proses dan tingkat perkembangan sesuatu. Lebih lanjut Pearce (dalam Sammeng, 2000:227) menemukan lima konteks dan konotasi penggunaan kata pengembangan, yaitu pertumbuhan ekonomi, modernisasi, pemerataan keadilan, transformasi sosio-ekonomi, dan pengorganisasian kembali tata ruang. Pearce juga menyatakan bahwa pengembangan merupakan konsep yang dinamis sehingga interpretasi atas maknanya telah dan akan berubah seiring dengan perjalanan waktu.

Kata pariwisata (*tourism*) biasanya selalu dimaknai sebagai sebuah proses pengembangan pariwisata (*tourism development*) yang secara otomatis di dalamnya mencakup pihak pengembang pariwisata (*tourism developer*) dan kawasan wisata (*tourism area*) atau tempat dilakukannya pengembangan pariwisata. Pengembangan pariwisata sering dipahami sebagai realisasi pembangunan (*developmentalism*) di sektor pariwisata.

Inskip (1991:316) menjelaskan pengembangan pariwisata sebagai berikut. Ketika melaksanakan pengembangan pariwisata, mereka yang berada di daerah tujuan wisata akan memandang perlu untuk pertama-tama membuat panduan-panduan pengembangan keseluruhan untuk memastikan bahwa ketika pengembangan dilakukan hal itu mencakup kebijakan-kebijakan dan tujuan-tujuan sosial budaya, lingkungan, dan ekonomi dari kawasan tersebut. Perlu juga bagi mereka yang berada di daerah tujuan tersebut untuk mengetahui panduan-panduan yang lebih spesifik yang menjelaskan karakteristik-karakteristik dasar mengenai cakupan, kualitas, dan jenis pengembangan yang diinginkan untuk didorong.

Terkait dengan pengembangan desa wisata, ada beberapa konsep dasar yang perlu mendapat perhatian, yaitu (1) desa wisata bukan direncanakan sebagai atraksi wisata semata-mata yang menjadikan manusia dan lingkungan desa tersebut sebagai objek museum untuk ditonton dan dinikmati, melainkan desa wisata sebagai bentuk pemanfaatan usaha pariwisata untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, serta terjadinya simbiosis mutualisme antara wisatawan dengan masyarakat desa; (2) desa wisata sebagai sebuah sel hidup, desa akan terkait dengan jaringan yang lebih besar (sistem regional) dan mempunyai berbagai elemen (sub-sistem desa) yang tidak boleh ditinggalkan. Sebagai sebuah sel, desa harus dijaga kemandiriannya, memiliki batas pertumbuhan dan perkembangan, dan desa tetap terjaga identitasnya; (3) setiap pengembangan program pembangunan di desa, yang dijadikan tolak ukurnya adalah sistem norma, adat, dan budaya setempat. Sistem kelembagaannya juga menggunakan berbagai kelembagaan lokal yang ada di desa, sehingga dapat dihasilkan pembangunan yang berorientasi pada masyarakat setempat (*community based development*).

Dalam penelitian ini, pengembangan Desa Wisata Timbrah dimaksudkan sebagai pengembangan Desa Timbrah sebagai desa wisata berdasarkan potensi budaya yang dimiliki, dengan harapan pengembangan desa wisata tersebut dapat memberikan manfaat budaya, lingkungan serta ekonomi kepada masyarakat desa setempat serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pengembangan desa wisata.

2. Pemberdayaan

Menurut Mardikanto (2012) pemberdayaan adalah upaya memenuhi kebutuhan individu, kelompok dan masyarakat luas yang memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungan termasuk sumber daya yang terkait dengan pekerjaan dan aktivitasnya. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*) karena pada dasarnya apapun yang dinikmati harus dihasilkan dari usaha sendiri. Tujuan akhir dari pemberdayaan adalah membuat masyarakat mandiri, berdaya, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

Aspek terpenting dalam program pemberdayaan masyarakat adalah program disusun sendiri oleh masyarakat, mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat, keterlibatan kaum miskin dan kelompok terpinggirkan lainnya, dibangun dari sumber daya lokal, sensitif terhadap nilai-nilai budaya, memperhatikan dampak lingkungan, tidak menciptakan ketergantungan, serta dilaksanakan secara berkelanjutan.

Dalam melakukan pemberdayaan masyarakat diperlukan strategi agar tujuan pemberdayaan dapat tercapai. Menurut Suharto (2005) strategi pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu mikro, mezo, dan makro. (1) Pendekatan mikro adalah pemberdayaan dilakukan terhadap masyarakat secara individu melalui bimbingan konseling, stress management, dan crisis intervention. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (*task centered approach*). (2) Pendekatan mezzo, pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok masyarakat melalui pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan untuk meningkatkan kesadaran,

pengetahuan, keterampilan dan sikap masyarakat agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapi. (3) Pendekatan makro, memandang masyarakat sebagai bagian yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.

Mengacu pada uraian tersebut di atas, dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk membuat masyarakat Desa Timbrah mandiri, berdaya, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan melalui penyusunan program terkait pengembangan Desa Wisata Timbrah, dimana sifat programnya adalah dari, oleh dan untuk masyarakat Desa Timbrah.

3. Desa Wisata

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2016:12) memberikan definisi desa wisata sebagai berikut.

Suatu wilayah dengan luasan tertentu dan memiliki potensi keunikan daya tarik wisata yang khas dengan komunitas masyarakatnya yang mampu menciptakan perpaduan berbagai daya tarik wisata dan fasilitas pendukungnya untuk menarik kunjungan wisatawan termasuk didalamnya kampung wisata karena keberadaannya di daerah kota.

Desa Wisata juga dikenal dengan istilahnya seperti *village tourism*, *rural tourism*, atau *farm tourism*. Menurut Pitana (1999:105) pengembangan desa wisata merupakan alternatif yang sensitif, karena jika salah dalam pengembangannya akan menimbulkan dampak bagi keberadaan *desa pakraman* tempat desa wisata itu dikembangkan.

Untuk Bali, desa wisata dijadikan salah satu sub-sistem pariwisata budaya. Konsep pariwisata budaya dianggap sebuah konsep yang mempergunakan budaya bukan saja untuk pariwisata, melainkan yang terpenting adalah pariwisata untuk budaya. Dalam pembangunan pariwisata budaya, karena desa wisata sebagai sub-sistem pariwisata budaya, maka sudah sepatutnya budaya sebagai bagian integral senantiasa harus dievaluasi agar tetap *cost and benefit* berimbang dan berlanjut (Picard, 1996:100).

Selanjutnya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2016:14-15) mengemukakan tipologi desa wisata menurut jenis sumber daya wisata dibedakan menjadi empat yaitu (1) desa wisata berbasis keunikan sumber daya alam sebagai daya tarik wisata utama, (2) desa wisata berbasis keunikan sumber daya budaya lokal sebagai daya tarik wisata utama, (3) desa wisata berbasis keunikan aktifitas/karya kreatif sebagai daya tarik wisata utama, dan (4) desa wisata berbasis kombinasi (keunikan sumber daya alam, sumber daya budaya lokal, dan aktifitas/karya kreatif) sebagai daya tarik wisata.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam penelitian ini yang dimaksud Desa Wisata Timbrah adalah wilayah Desa Timbrah yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian Desa Timbrah beserta potensi alam dan budayanya, serta mempunyai potensi untuk dikembangkan berbagai produk pariwisata dalam mendukung pengembangan Desa Wisata Timbrah Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem.

C. Landasan Teori

Untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian dipergunakan Teori Pembangunan Pariwisata Berbasis Masyarakat. Adapun uraiannya seperti berikut ini.

Teori Pembangunan Pariwisata Berbasis Masyarakat

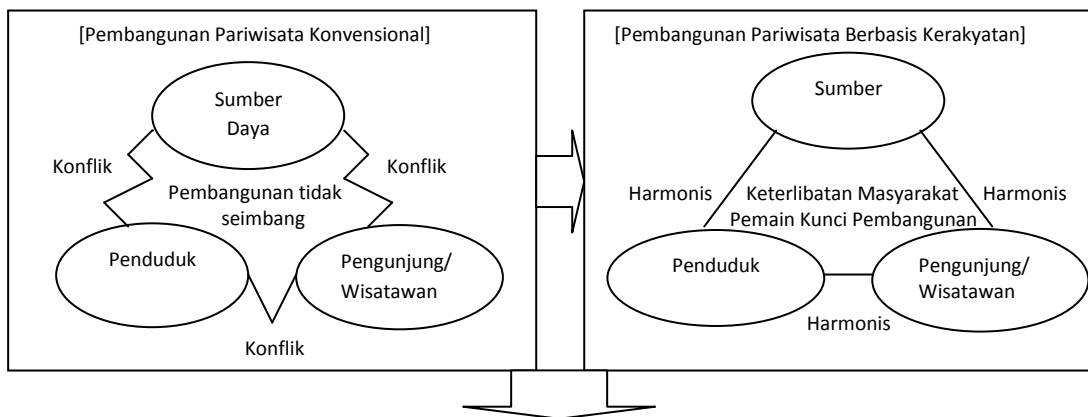
Salah satu wacana yang saat ini kembali menghangat adalah tentang pembangunan pariwisata berbasis masyarakat (*tourism based community development*). Pembangunan pariwisata berbasis masyarakat berbeda dengan pembangunan pariwisata yang bersifat konvensional. Jika pada pembangunan yang bersifat konvensional, kebijakan dalam bidang pembangunan pariwisata dengan sistem *top-down*, yakni menggunakan pendekatan sentralistik, sedangkan pada pembangunan pariwisata berbasis masyarakat menggunakan pendekatan dari bawah ke atas atau menekankan pada sistem *bottom-up*.

Pembangunan pariwisata berbasis masyarakat merupakan sebuah teori yang menekankan pada ekonomi rakyat dan pemberdayaan rakyat. Teori ini dipergunakan sebagai reaksi dari kegagalan modernisasi yang diterapkan selama ini di negara-negara berkembang. Pengambilan kebijakan *top-down* dianggap telah melupakan hakikat dasar pembangunan itu sendiri sehingga rakyat bukannya semakin meningkat kualitas hidupnya, tetapi malah dirugikan dan cenderung termarjinalkan di lingkungan miliknya sendiri (Pitana, 1999:75). Dengan demikian, kunci utama pembangunan (Natori, 2001) adalah keseimbangan dan keharmonisan antara lingkungan hidup, sumber daya, dan kepuasan wisatawan yang diciptakan oleh kemauan masyarakat itu sendiri. Ketiga faktor tersebut menjadi prioritas untuk keberlanjutan sistem sosial, budaya, dan ekonomi.

Menurut Erawan (2003) pariwisata berbasis masyarakat (*community based tourism*) memiliki karakteristik berskala kecil, dimiliki oleh anggota/kelompok masyarakat setempat sehingga memberikan manfaat pada masyarakat setempat, memberikan kesempatan kerja dan peluang ekonomi pada ekonomi setempat, lokasi tersebar dan tidak terkonsentrasi di suatu tempat, disain dan kegiatan mencerminkan karakter wilayah setempat, mengedepankan kelestarian warisan budaya (*culture heritage*), tidak mematikan industri dan kegiatan lainnya yang bersifat saling melengkapi, menawarkan pengalaman yang berkualitas pada wisatawan, dan merupakan kegiatan usaha yang menguntungkan.

Teori pembangunan pariwisata berbasis masyarakat dianggap sebagai kebalikan dari teori konvensional yang sangat menekankan pembangunan, yakni diawali dari bawah (*bottom-up*). Pada kondisi seperti ini akan terjadi proses social learning sehingga masyarakat setempat disyaratkan terlibat dalam berbagai tahap pembangunan. Dengan demikian pengelolaan pembangunan benar-benar dilakukan oleh mereka yang hidup dan kehidupannya dipengaruhi oleh pembangunan itu sendiri (Pitana, 1999:76).

Lebih lanjut Natori (2001:6) dalam bukunya *A Guidebook for Tourism-Based Community Development*, membedakan pembangunan pariwisata konvensional dengan pembangunan pariwisata berbasis kerakyatan. Pada model pembangunan pariwisata konvensional, interaksi antara sumber daya, penduduk, dan pengunjung tidak seimbang sehingga menimbulkan konflik. Namun, pada model pembangunan pariwisata berbasis kerakyatan, sumber daya, penduduk lokal, dan pengunjung berinteraksi secara harmonis, di samping menjadikan masyarakat sebagai pemain kunci dalam pembangunan pariwisata. Adapun penggambaran perbedaan pembangunan pariwisata konvensional dengan pembangunan pariwisata berbasis kerakyatan adalah seperti Gambar 1.



- o Pembangunan diartikan untuk kesejahteraan hidup masyarakat
- o Revitalisasi masyarakat melalui penggunaan sumber daya
- o Promosi pariwisata harmonis dengan kehidupan lokal dan lingkungan hidup
- o Kapasitas merespon untuk meningkatkan permintaan pariwisata

Gambar 1
Arti Penting Pembangunan Pariwisata Berbasis Kerakyatan

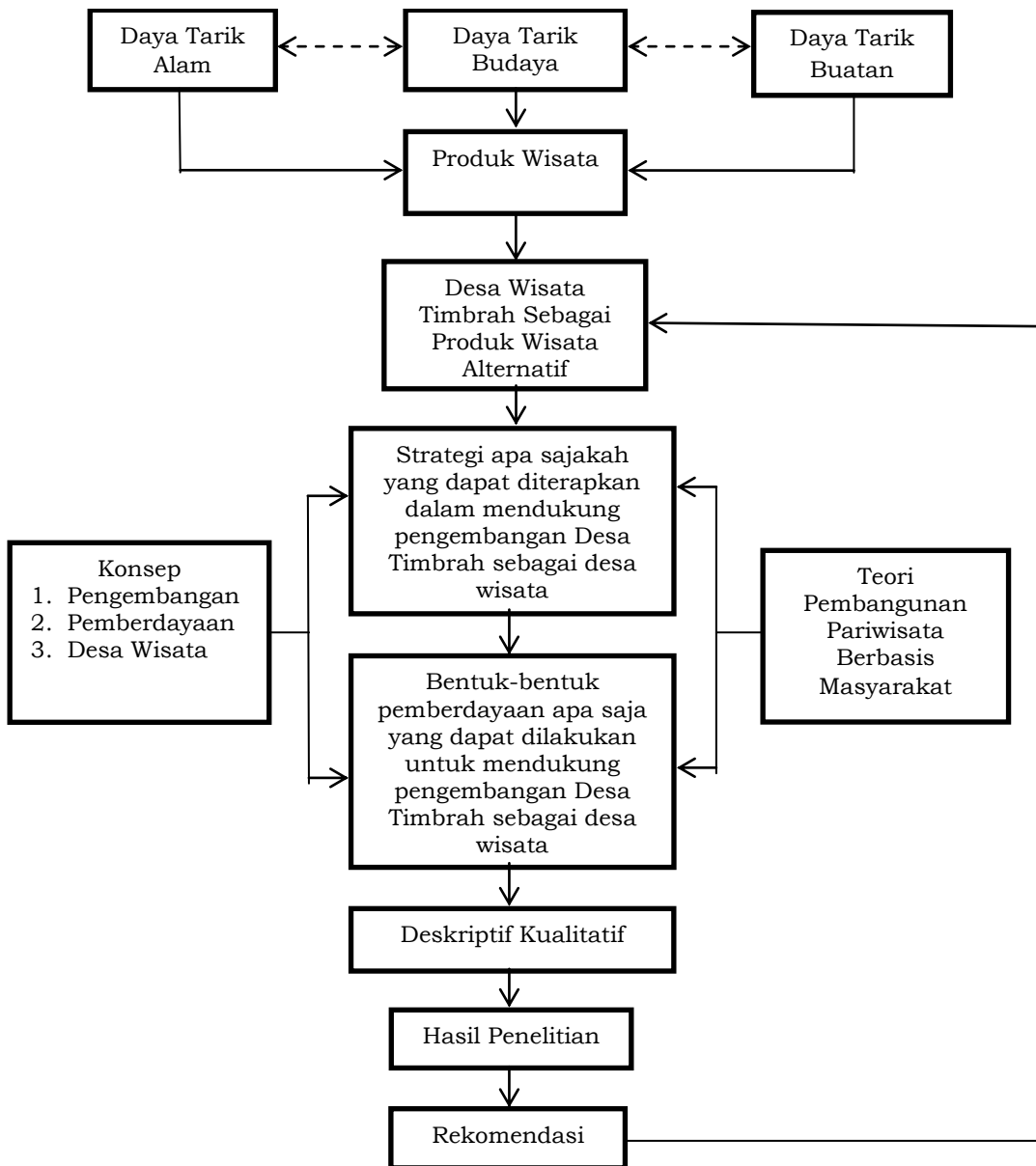
(Sumber: Natori, 2001:6)

Teori pembangunan pariwisata berbasis masyarakat, jika dikaitkan dengan penelitian ini, mempertegas pentingnya keterlibatan masyarakat setempat dengan berbagai potensi dan sumber

daya lokal yang dimilikinya pada pengembangan pariwisata di Desa Wisata Timbrah. Keterlibatan masyarakat setempat menjadi penting, mengingat kenyataan selama ini, yaitu manfaat pariwisata lebih banyak berpihak pada pemilik modal yang umumnya berasal dari luar masyarakat setempat. Akhirnya harapan untuk menyejahterakan masyarakat setempat dari pengembangan desa wisata yang dilakukan tidak sepenuhnya dapat terlaksana. Teori pembangunan pariwisata berbasis masyarakat fokus pada penggunaan pendekatan dari bawah ke atas (*bottom-up*) atau merupakan kebalikan dari pembangunan konvensional, dengan menekankan keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap pengembangan desa wisata untuk menyejahterakan masyarakat.

D. Kerangka Penelitian

Daya tarik alam, daya tarik budaya dan daya tarik buatan adalah tiga komponen pembentuk produk wisata, dimana ketiganya dapat dikombinasikan satu dengan yang lainnya. Ketiga komponen produk wisata tersebut dapat mempengaruhi satu dengan yang lainnya secara langsung maupun tidak langsung. Desa wisata sebagai produk wisata alternatif disajikan untuk menjawab kejenuhan yang dialami wisatawan dalam mengkonsumsi produk wisata. Desa wisata Timbrah di Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem adalah lokus dari penelitian ini, dengan mengkaji strategi yang dapat diterapkan dalam mendukung pengembangan Desa Timbrah sebagai desa wisata serta bentuk-bentuk pemberdayaan yang dapat dilakukan untuk mendukung pengembangan Desa Timbrah sebagai desa wisata. Dengan mempergunakan teori pembangunan pariwisata berbasis masyarakat, data penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi yang dapat dipergunakan dalam pengembangan Desa Wisata Timbrah. Adapun kerangka penelitian seperti Gambar 2.



Gambar 2
Kerangka Penelitian

III. METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan dengan analisis deskriptif kualitatif. Menurut Bungin (2006:34), dengan analisis deskriptif kualitatif maka paradigma penelitian ini adalah interpretivisme (pospositivisme) yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial terkait pengembangan desa wisata sebagai produk wisata alternatif.

B. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini jenis data yang dipergunakan adalah data kualitatif (sebagai data primer dan sekunder), sedangkan sumber datanya terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah informan dan sumber data sekunder adalah dokumen dan monografi Desa Timbrah.

C. Penentuan Informan

Informan dalam penelitian ini ditentukan secara *purposive*. Menurut Arikunto (1989:113) penentuan informan seperti ini adalah dengan cara mengambil subjek bukan berdasarkan strata, *random*, atau daerah, tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Aparat Desa Timbrah, Pengurus *Desa Adat* Timbrah, *sekaa-sekaa*, Bidang Destinasi Diparda Karangasem, serta Kasi Destinasi dan Pariwisata Budaya Dinas Pariwisata Provinsi Bali.

D. Instrumen Penelitian

Sebagai sebuah penelitian kualitatif, peneliti sebagai instrumen utama dalam pengumpulan dan interpretasi data. Selain itu, instrumen dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara (*interview guide*) dengan pertanyaan bersifat terbuka dan catatan lapangan (*field notes*) yang dipergunakan untuk mencatat apa yang dilihat, dialami dan didengar selama pengumpulan data di lapangan.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi yang dilakukan adalah observasi non-partisipasi, dengan cara mengadakan pengamatan tidak berperan serta. Pengamatan seperti ini dilakukan untuk memperoleh data terkait berbagai usaha yang dilakukan pada pengembangan Desa Timbrah sebagai desa wisata, serta untuk memperoleh gambaran tentang pemberdayaan yang sudah dilakukan terhadap masyarakat Desa Timbrah.

2. Wawancara

Pewawancara mengajukan pertanyaan kepada informan yang sudah ditentukan secara *purposive* dengan *face to face* dan mengacu pada pedoman wawancara (*interview guide*). Pertanyaan yang diajukan kepada Aparat Desa Timbrah, Pengurus *Desa Adat* Timbrah, *sekaa-sekaa* tentang pengembangan Desa Wisata Timbrah serta pemberdayaan yang sudah dilakukan terhadap masyarakat setempat dalam rangka mendukung Desa Wisata Timbrah. Sedangkan wawancara terhadap Bidang Destinasi Diparda Karangasem serta Kasi Destinasi dan Pariwisata Budaya Dinas Pariwisata Provinsi Bali terkait dengan kebijakan pengembangan desa wisata.

3. Studi Dokumen

Dalam penelitian ini studi dokumen dimaksudkan sebagai penggunaan dokumen yang berhubungan dengan pengembangan dan potensi yang dimiliki oleh Desa Wisata Timbrah. Dokumen tersebut berasal dari Desa Timbrah berupa Monografi Desa Timbrah maupun dari instansi lain yang terkait dengan Desa Wisata Timbrah seperti potensi wisata Desa Timbrah serta kajian-kajian akademik tentang keunikan budaya yang dimiliki oleh Desa Wisata Timbrah.

F. Teknik Analisis Data

Data dalam penelitian ini dianalisis dengan deskriptif kualitatif. Hasil analisis data disajikan secara formal (dengan mempergunakan tabel) dan secara informal (dengan mempergunakan uraian/kata-kata).

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Strategi Pengembangan Desa Timbrah sebagai Desa Wisata

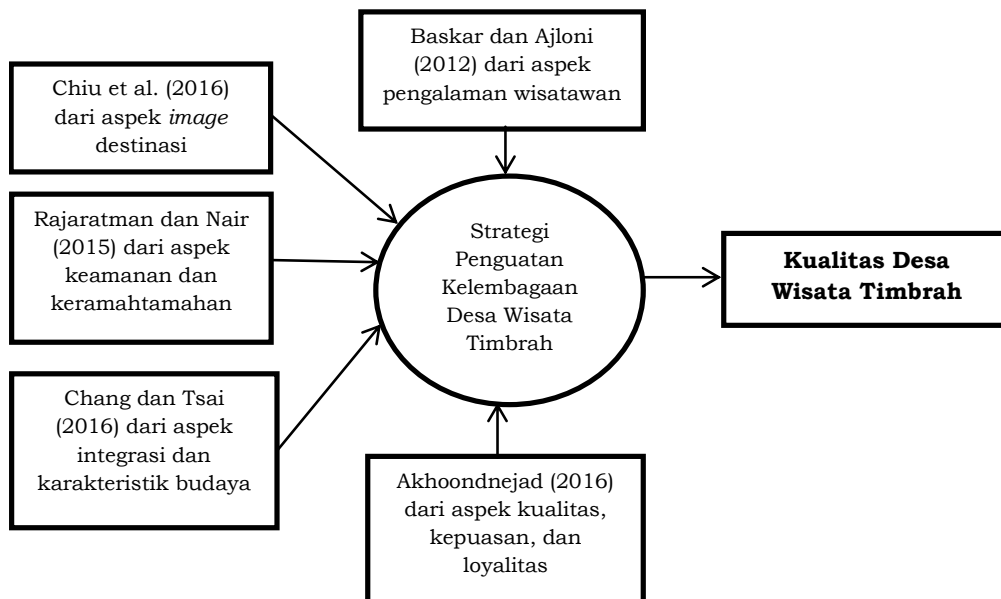
Pengembangan Desa Timbrah sebagai desa wisata berbasis budaya, dalam penelitian ini menemukan bahwa dari aspek kelembagaan (*ancillary*) perlu melakukan strategi penguatan kelembagaan dan strategi kemitraan.

1. Strategi Penguatan Kelembagaan

Strategi penguatan kelembagaan yang perlu dilakukan oleh Desa Wisata Timbrah merupakan strategi untuk mempertahankan eksistensi Desa Timbrah sebagai desa berbasis budaya. Strategi ini dioperasionalkan dengan mengembangkan Desa Timbrah sebagai desa wisata berbasis budaya, melalui pelibatan masyarakat desa setempat dalam kegiatan pariwisata yang berorientasi pelestarian budaya. Strategi penguatan kelembagaan ini juga dilakukan dengan penguatan terhadap kelompok-kelompok (*sekaa-sekaa*) yang menghasilkan karya kreatif dan inovatif

dalam rangka memperkuat pengembangan produk wisata di Desa Wisata Timbrah. Penguatan kelembagaan ini mampu memperkuat kelembagaan serta citra Desa Wisata Timbrah. Penguatan kelembagaan ini juga diharapkan memberikan pengaruh yang lebih kuat terkait implementasi sadar wisata oleh masyarakat Desa Timbrah. Selain itu melalui strategi penguatan kelembagaan ini diharapkan semua kegiatan melembaga antara masyarakat, pengelola desa wisata, pelaku usaha dan wisatawan. Hasil akhir dari penguatan kelembagaan ini adalah terjadi peningkatan kualitas wisata Desa Wisata Timbrah serta kunjungan wisatawan meningkat.

Strategi penguatan kelembagaan ini mengkonfirmasi perlunya mengimplementasikan hasil penelitian dari Baskar dan Ajloni (2012) dari aspek pengalaman wisatawan, Chiu et al. (2016) dari aspek *image* destinasi; Rajaratman dan Nair (2015) dari aspek keamanan dan keramahan; Chang dan Tsai (2016) dari aspek integrasi dan karakteristik budaya; serta Akhoondnejad (2016) dari aspek kualitas, kepuasan, dan loyalitas. Jika strategi penguatan kelembagaan ini dihubungkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, maka dapat disajikan seperti Gambar 3.



Gambar 3
Konfirmasi Penelitian Sebelumnya Terhadap Strategi
Penguatan Kelembagaan Desa Wisata Timbrah

Jika kelembagaan diidentikkan dengan sebuah struktur organisasi Manajemen Operasional (MO) Desa Wisata, maka struktur organisasi MO di Desa Wisata Timbrah tersebut dalam kaitan penguatan kelembagaan lebih tepat diisi oleh perwakilan dari masing-masing pranata sosial kemasyarakatan yang ada di desa tersebut, seperti *Perbekel*, *Bendesa Adat*, *Pekaseh*, *Kelian Banjar*, *Kelian Dusun*, Badan Pertimbangan Desa, Pokdarwis, *Teruna-Teruni*, *Pecalang*, serta

unsur-unsur lainnya. Pelibatan pranata sosial kemasyarakatan yang ada di Desa Wisata Timbrah selain untuk penguatan kelembagaan juga untuk mengimplementasikan pariwisata berbasis masyarakat (*community based tourism*). Sedangkan unsur-unsur lain seperti dari pemerintahan tingkat kecamatan, tingkat kabupaten serta tingkat provinsi hanya bersifat sebagai pembina dan menjalankan fungsi koordinasi.

2. Strategi Kemitraan

Banyak program yang terkait dengan masalah peningkatan pemberdayaan masyarakat dilakukan secara kemitraan diantara pihak-pihak yang mewakili kepentingan akan isu-isu tersebut. Bentuk kemitraan pada pengembangan desa wisata ini dapat diformalkan dalam bentuk kelompok tim (*project team*) atau kelompok kerja (*task force*) yang lebih menitikberatkan pada pelibatan masyarakat desa setempat.

Pengertian mitra (*partner*) pada umumnya diartikan setiap individu, kelompok, atau institusi termasuk pemerintah dan swasta yang secara aktif berpartisipasi dan memberikan dukungan penting untuk keberhasilan implementasi program pengembangan desa wisata. Mitra suatu kegiatan bisa bersifat internal, artinya berasal dari lingkungan internal desa wisata (perorangan atau pengusaha desa setempat). Sedangkan mitra dari pihak luar antara lain institusi pemerintah dan perusahaan swasta lokal yang tertarik mengembangkan desa wisata dengan prinsip menguntungkan masyarakat di desa wisata. Sedangkan pengelolaan kemitraan adalah proses untuk meneruskan, memelihara secara efektif, produktif dan hubungan yang harmonis dengan mitra. Pengelolaan kemitraan ini bisa dilakukan mulai dari yang informal, seperti melakukan kontak telepon, dan menulis *e-mail* sampai kepada yang sangat formal seperti menulis surat, menandatangani kesepakatan kerjasama dan mengkaji kegiatan kemitraan secara periodik. Hal yang sangat penting dalam pengelolaan kemitraan adalah menyediakan waktu yang cukup dan sumberdaya untuk menjaga kemitraan, dimana bisa dilakukan dengan berkomunikasi secara reguler dengan mitra, melalui kegiatan ini sekaligus dapat dinilai bagaimana pelaksanaan program kemitraan yang sedang berjalan.

Dalam bidang pariwisata, program kemitraan sangat penting karena melalui program kemitraan dan jejaring diantara *stakeholders* pariwisata akan menciptakan mata rantai program/kegiatan dengan upaya peningkatan kemampuan daya tarik desa wisata. Daya tarik desa wisata dibentuk oleh berbagai atribut yang ada di desa wisata seperti atraksi, infrastruktur dan aksesibilitas, amenities, SDM, citra dan harga. Untuk mendorong peningkatan kualitas masing-masing atribut desa wisata tersebut, perlu program kemitraan diantara *stakeholders* desa wisata, yang memiliki keterkaitan dengan masing-masing atribut pembentuk daya tarik desa wisata.

Pengelolaan Desa Wisata Timbrah harus mengimplementasikan kebijakan dan perencanaan pengembangan desa wisata. Pola kemitraan secara berkelanjutan dapat meliputi pengembangan

organisasi, pemasaran, kualitas pelayanan/pengalaman, pengembangan sumber daya manusia, pengelolaan pengunjung, pendampingan, dan pemanfaatan sumber daya desa wisata. Untuk meningkatkan efektivitas program kemitraan dalam pengembangan Desa Wisata Timbrah, diperlukan pemeliharaan kemitraan yang efektif antara para pihak yang terkait dengan kemitraan tersebut, agar program pengembangan Desa Timbrah sebagai desa wisata benar-benar berjalan sesuai dengan maksud dan tujuannya. Keberhasilan dan kegagalan dalam program kemitraan desa wisata pada umumnya disebabkan oleh bagaimana para pihak yang terlibat dalam program kemitraan menangani berbagai tantangan dan peluang yang terkait dengan program yang dilaksanakan.

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kemitraan dalam program pengembangan Desa Wisata Timbrah, perlu empat langkah pokok yang harus dilaksanakan yaitu (1) menetapkan dan mengkaji program kemitraan, (2) menentukan tata kelola kemitraan, (3) memformalisasikan kemitraan, dan (4) memelihara hubungan secara kuat dengan para mitra (*partner*). Melalui tahapan tersebut diharapkan keberhasilan program kemitraan diantara *stakeholders* Desa Wisata Timbrah akan lebih efektif karena masing-masing pihak senantiasa melakukan interaksi dan koordinasi dalam mengatasi berbagai tantangan dan peluang yang terkait dengan program pengembangan desa wisata.

Keberhasilan pengembangan Desa Wisata Timbrah, disamping melalui pengembangan kemitraan yang bersifat formal melalui program kemitraan antara masing-masing mitra (masyarakat Desa Timbrah, Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem, Pengusaha dari desa setempat), juga dapat dilakukan melalui pengembangan jejaring (*network*) diantara desa wisata yang ada di Kabupaten Karangasem atau desa wisata di luar Kabupaten Karangasem. Upaya pengembangan jejaring diantara desa wisata dapat dijadikan wahana dalam penyamaan persepsi antara para pelaku dan pengelola desa wisata dalam memandang berbagai tantangan dan peluang pada pengembangan desa wisata. Melalui pengembangan jejaring diantara desa wisata, akan muncul ide-ide (gagasan) atau pemikiran inovatif dan kreatif yang terkait dengan upaya peningkatan kemajuan pengembangan desa wisata. Dalam persaingan yang sangat ketat antar desa wisata (baik antara desa wisata di Kabupaten Karangasem maupun antara desa wisata di Kabupaten Karangasem dengan di luar Kabupaten Karangasem) dituntut mampu memberikan penawaran produk wisata atau pengalaman wisata yang memiliki nilai tambah (*value added*) bagi wisatawan terutama kaitannya dengan *value for money*.

B. Bentuk-bentuk Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata Timbrah

Bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Timbrah dikelompokkan menjadi 3 yaitu pemberdayaan pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan/implementasi dan tahap pengawasan. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut.

1. Tahap Perencanaan

Agar pengembangan desa wisata diharapkan mampu menjadi penggerak bagi penciptaan penambahan pendapatan, penyediaan lapangan kerja, perbaikan lingkungan, meningkatkan perhatian masyarakat terhadap kelestarian alam dan budaya serta lingkungan, dan peningkatan keterampilan sumber daya manusia dalam kompetensi kepariwisataan, maka sejak perencanaan masyarakat Desa Timbrah yang desanya dikembangkan sebagai desa wisata perlu diberdayakan. Pemberdayaan yang dilakukan terhadap masyarakat Desa Timbrah pada tahap perencanaan ini antara lain melibatkan mereka dalam penyusunan rencana pengembangan desa wisata. Harapannya, setelah masyarakat desa dilibatkan dalam penyusunan perencanaan pengembangan Desa Wisata Timbrah, mereka nantinya akan mengetahui dan dapat memahami apa dan bagaimana desa wisata itu, apa yang dapat mereka dilakukan dan tidak dapat mereka lakukan terkait desa wisata, bagaimana melakukannya, dan siapa saja yang diajak bekerjasama dalam mewujudkan tujuan pengembangan desa wisata. Ini berarti dengan memberdayakan masyarakat Desa Timbrah dalam penyusunan rencana pengembangan desa wisata, dapat meletakkan landasan yang kuat bagi tumbuh dan berkembangnya Desa Wisata Timbrah serta meletakkan tanggungjawab bagi keberhasilan dan keberlanjutan program desa wisata di desa mereka.

Bentuk pemberdayaan pada tahap perencanaan ini antara lain dengan melibatkan masyarakat Desa Timbrah dalam pertemuan/*fokus group discussions/paruman* yang khusus membahas pengembangan Desa Wisata Timbrah, penyusunan panduan pengembangan desa wisata, penyusunan rencana anggaran, penyusunan rencana aktivitas dan produk wisata yang dapat ditawarkan kepada wisatawan termasuk didalamnya strategi mempromosikan aktivitas dan produk wisata tersebut.

2. Tahap Pelaksanaan/Implementasi

Sebelum dilakukan pemberdayaan pada tahap pelaksanaan/ implementasi, masyarakat Desa Timbrah perlu diberikan pelatihan. Materi pelatihan terutama terkait dengan aspek pelayanan (*service*) dari produk-produk yang akan ditawarkan kepada wisatawan di desa wisata, antara lain mencakup keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*) dan sikap (*attitude*). Sedangkan peserta pelatihannya dapat berasal dari unsur muda-mudi/*sekaa teruna teruni*, kelompok (*sekaa*) kesenian, *desa adat*, kelompok sadar wisata (pokdarwis), kelompok balawista, kelompok pemandu wisata (*guide*) serta perorangan dan unsur lainnya yang berasal dari Desa Timbrah. Unsur-unsur tersebut terlibat dalam menyediakan pelayanan dari produk wisata yang akan ditawarkan oleh Desa Wisata Timbrah kepada wisatawan nusantara dan mancanegara.

Bentuk-bentuk pelatihan yang dapat diberikan antara lain pelatihan berbicara dan menulis dalam bahasa Inggris (*speaking and wraiting in English*), pelatihan membuat dan menyajikan

makanan dan minuman (*food and beverage product, food and beverage service*), pelatihan kebersihan dan kesehatan (*hygiene and sanitation*), pelatihan menata meja (*table setup*), pelatihan membersihkan kamar, pelatihan sebagai petugas keamanan bagi wisatawan (dapat melibatkan *pecalang*), pelatihan menampilkan kesenian, pelatihan penyelamatan di laut dan sungai, pelatihan sebagai pemandu wisata, serta pelatihan lainnya yang diperlukan untuk operasional Desa Wisata Timbrah.

Selain bentuk-bentuk pelatihan di atas, ada juga bentuk pelatihan lain yang dapat diberikan kepada masyarakat Desa Wisata Timbrah. Bentuk pelatihan ini dikaitkan dengan potensi yang dimiliki oleh Desa Wisata Timbrah. Beberapa potensi budaya yang dapat dimiliki oleh Desa Wisata Timbrah selain potensi alam antara lain kehidupan sehari-hari masyarakat desa, upacara adat, tradisi yang bersifat unik (*ngusaba guling, usaba muhu-muhu/mecaru* desa, *megibung, mepeed* saat Ida Batara Turun Kabeh), kesenian tradisional serta potensi lainnya. Dengan potensi budaya ini, maka dalam rangka pengembangan Desa Wisata Timbrah, masyarakat desa setempat perlu diberikan pelatihan terkait kependudukan potensi budaya tersebut, dengan harapan akan lahir pemandu wisata lokal dari Desa Wisata Timbrah yang mampu menjelaskan potensi budaya tersebut.

Setelah masyarakat di desa wisata siap dengan keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang diperlukan, barulah produk wisata yang ada di Desa Wisata Timbrah siap ditawarkan kepada wisatawan. Untuk dapat memuaskan wisatawan, maka produk wisata yang ditawarkan perlu disertai dengan pelayanan yang berkualitas, serta pelayannya dengan memberdayakan masyarakat Desa Wisata Timbrah. Adapun bentuk-bentuk pemberdayaan yang dapat dilakukan terhadap masyarakat di Desa Wisata Timbrah seperti Tabel 1.

Tabel 1
Bentuk-bentuk Pemberdayaan Masyarakat Yang Dapat Dilakukan Terhadap Masyarakat di Desa Wisata Timbrah

No.	Aktivitas/Daya Tarik	Bentuk Pemberdayaan Masyarakat
1	Membuat makanan/minuman tradisional	Menyiapkan bahan, termasuk menunjukkan kepada wisatawan pohon dari bahan makanan/minuman, menjelaskan proses pembuatan makanan dan minuman termasuk mempraktekkan pembuatannya, serta menyajikan makanan/minuman dengan peralatan tradisional yang ada di Desa Timbrah
2	Membuat kerajinan lokal	Menyiapkan alat, menyiapkan bahan, mendemonstrasikan proses pembuatan kerajinan lokal khas Desa Timbrah
3	Jalan-jalan (<i>trakking</i>)	Pemandu wisata <i>trekking</i>

4	Pengamanan	Sebagai sekuriti atau <i>pecalang</i> pada daya tarik wisata di Desa Timbrah
5	<i>Mejejahitan</i>	Menyiapkan alat seperti pisau (<i>lemat</i>), dan bahan (janur, daun rontal, <i>semat</i> , dll), mendemonstrasikan proses pembuatan <i>jejahitan</i> kepada wisatawan
6	Menabuh	Menyiapkan gamelan serta melatih wisatawan memainkan gamelan tradisional
7	Memancing	Menyiapkan pancing, umpan, mengajarkan penggunaan pancing tradisional, dan menjaga keamanan wisatawan saat memancing
8	Menari	Menyiapkan gamelan/musik pengiring tarian, melatih wisatawan menari
9	Cinderamata/kerajinan lokal desa	Menyiapkan bahan lokal desa dan alat pembuat kerajinan serta mengajarkan pembuatan kerajinan khas Desa Timbrah kepada wisatawan
10	Mengelola <i>homestay</i>	Menyiapkan kamar, menyiapkan makanan dan minuman, menjaga keamanan, menyiapkan pelayanan yang sehat dan berkualitas
11	Upacara keagamaan	Memberikan informasi terkait upacara keagamaan yang unik di Desa Timbrah sekaligus menjadi pemandu wisata lokal

Sumber : Hasil Penelitian, 2017

Keberhasilan Desa Wisata Timbrah selain dilihat dari keberhasilan pemberdayaan yang dilakukan terhadap masyarakat Desa Timbrah, juga antara lain dapat dilihat dari sikap menerima dari masyarakat desa terhadap pengembangan desanya sebagai desa wisata; kemampuan dari desa wisata membentuk jaringan dengan desa wisata lain; pelayanan yang memenuhi standar dalam bidang kepariwisataan; dan terbentuknya manajemen pengelola desa wisata yang terdiri atas unsur-unsur pranata sosial kemasyarakatan yang ada di Desa Timbrah.

3. Tahap Pengawasan

Pada tahap ini, pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan mengikutsertakan komponen masyarakat Desa Timbrah pada pengawasan terhadap operasional desa wisata. Pengawasan oleh masyarakat Desa Timbrah sebagai penerima pariwisata, pendukung, sekaligus pelaku desa wisata bertujuan untuk mengupayakan kelestarian wilayah serta kehidupan alam dan budaya setempat sejalan dengan *tri hita karana*. Parameter pemberdayaan dalam pengawasan adalah keterlibatan masyarakat Desa Timbrah dalam tim pengawasan berikut kewenangan yang dimiliki. Pemberdayaan masyarakat dalam tahap pengawasan dibedakan menjadi pengawasan pada aspek operasional dan pengawasan pada aspek non-operasional.

a. Pengawasan pada Aspek Operasional

Keterlibatan masyarakat Desa Timbrah dalam melakukan pengawasan terhadap operasional Desa Wisata Timbrah dapat berupa pengawasan yang bersifat preventif. Tujuannya adalah untuk mencegah tindakan-tindakan yang dapat mengganggu kelancaran operasional desa wisata, seperti mengawasi dan mengatur parkir kendaraan wisatawan, dan mengawasi dan menjaga keamanan wisatawan selama berada di desa wisata.

Pengawasan untuk aspek teknis yang terkait dengan operasional Desa Wisata Timbrah dilakukan oleh komponen masyarakat Desa Timbrah yang bekerja pada Badan Pengelola atau Manajemen Operasional Desa Wisata Timbrah (jika sudah terbentuk, jika belum terbentuk dapat mempergunakan Kelompok Sadar Wisata/Pokdarwis). Masyarakat Desa Timbrah yang menjadi pengurus Badan Pengelola atau Manajemen Operasional Desa Wisata Timbrah dapat melakukan pengawasan secara aktif dan langsung berdasarkan pada tugasnya masing-masing (*job description*) yang sudah ditentukan oleh Manajemen Operasional. Pengawasan yang dilakukan antara lain terkait dengan kelancaran operasional desa wisata seperti masalah parkir kendaraan wisatawan, kebersihan area desa wisata, keuangan, administrasi, program/paket wisata, pelayanan tiket/karcis masuk desa wisata, serta hal-hal teknis operasional lainnya.

Pelibatan pihak eksternal (Organisasi Perangkat Daerah dari Tingkat Provinsi hingga Kecamatan, Akademisi) dalam pengawasan sebagai upaya untuk dapat memberikan arahan, bimbingan, dan kontrol dari kegiatan/program yang dilaksanakan oleh desa wisata. Masyarakat lokal juga dilibatkan pada bidang pengawas sebagai perwakilan masyarakat. Pelibatan masyarakat lokal dalam pengawasan dengan menempatkan perwakilan pada Badan Pengelola Desa Wisata, merupakan suatu cara untuk meningkatkan pengawasan internal dan pengawasan melekat dalam operasional desa wisata.

b. Pengawasan pada Aspek Non-operasional

Dalam operasional kegiatan Desa Wisata Timbrah, masyarakat yang bekerja pada Badan Pengelola dan Manajemen Operasional dapat melakukan pengawasan secara langsung. Pengawasan yang dilakukan tidak terbatas pada pelaksanaan tugas rutin sebagai karyawan Badan Pengelola dan Manajemen Operasional, tetapi dapat bersifat lebih kompleks dan bersifat non-operasional seperti menjaga implementasi aturan di bidang tata ruang dan jalur hijau yang terkait dengan Desa Wisata Timbrah. Hal ini untuk memastikan bahwa semua pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan Desa Timbrah sebagai Desa Wisata tidak bertentangan dengan aturan terkait peruntukan lahan. Hal ini juga terkait dengan keberhasilan implementasi *tri hita karana* dalam pengembangan desa wisata.

Pengawasan pada aspek non-operasional terkait dengan implementasi peraturan-peraturan untuk pengendalian dan pembatasan pembangunan pada zonasi tertentu, diperlukan sinergi

antara pemerintah, masyarakat desa, dan pengusaha pariwisata. Pemerintah sebagai regulator harus dapat memberikan arahan dan bimbingan, menegakkan aturan-aturan, namun tetap memperhatikan saran serta pendapat masyarakat desa yang desanya dikembangkan sebagai desa wisata. Masyarakat desa dan pengusaha pariwisata juga harus mendukung aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan pen-zoning-an pada wilayah tertentu.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan, dapat ditarik simpulan sebagai berikut.

1. Dari aspek strategi penguatan kelembagaan, Desa Wisata Timbrah perlu melibatkan pranata sosial kemasyarakatan dalam Manajemen Operasional (MO) untuk mempertahankan eksistensi Desa Timbrah sebagai desa wisata berbasis budaya.
2. Strategi kemitraan yang dapat dilakukan oleh Desa Wisata Timbrah yaitu melalui pengembangan kemitraan formal dengan program kemitraan diantara *stakeholders* pariwisata (masyarakat Desa Timbrah, Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem, Pengusaha dari Desa Timbrah).
3. Bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat yang dapat dilakukan untuk masyarakat Desa Wisata Timbrah antara lain sebagai pembuat makanan/minuman tradisional, pembuat kerajinan lokal, pemandu tracking, petugas pengaman, *mejejahitan*, pelatih tabuh dan tari, pembuat kerajinan lokal, pengelola *homestay*, dan pemandu wisata lokal.

B. Rekomendasi

Adapun beberapa hal yang direkomendasikan dalam pengembangan Desa Timbrah sebagai desa wisata sebagai berikut.

1. Sebelum terbentuknya Pengelola Desa Wisata atau Manajemen Operasional Desa Wisata Timbrah, pengelolaan desa wisata dapat dikelola oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).
2. Desa wisata perlu menunjuk pendamping (dari masyarakat atau akademisi) dalam kaitan operasionalisasi desa wisata, dengan catatan pendamping tersebut memahami dan memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait operasional desa wisata.
3. Desa wisata perlu berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan dan kabupaten dalam pengembangan program termasuk penyusunan rencana kerja.
4. Dalam pengembangan Desa Wisata Timbrah, secara maksimal menggunakan potensi, modal budaya dan modal sosial yang ada di desa setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhoondnejad, A. (2016). Tourist Loyalty to a Local Culture Event: the Case of Turkmen Handicrafts Festival. *Journal of Tourism Management*. 52, 468-477.
- Arikunto, S. (1989). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Edisi Revisi). Jakarta: Rineka Cipta.
- Bashar, Ajloni, A.A.A. (2012). Motivating Foreign Tourist to Visit The Rural Site in Jordan, Village of Petra. *Australian Journal of Business and Management Research*. 2(5), 01-07.
- Chang, F.H., Tsai, C.Y. (2016). Influences of The Cultural Implications and Tourism Attractiveness of Festival Tourism on Tourist. *Journal of Business and Management Studies*. 2(1),1-10.
- Chiu, W, Zeng, S., Cheng, P.S.T. (2016). The Influence of Destination Image and Tourist Satisfaction on Tourist Loyalty: A Case Study of Chinese Tourist in Korea. *International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research*. 10(2), 223-234.
- Dolors, M.G., Canoves., Valdovinos. (1995). Farm Tourism, Gender and The Environment in Spain. *Annals of Tourism Research*. 22(2), 267-282.
- Dowling, R. (1996). Ecotourism in Thailand. *Annals of Tourism Research*. 23(2), 267-282.
- Erawan, I N. (2003). *Menuju Pembangunan Pariwisata Bali yang Berkelanjutan*. Makalah pada Seminar Penilaian Dampak Krisis dan Koordinasi Respons Atas Bom Bali Kerjasama UNDP, USAID, dan World Bank. Denpasar 20 Desember 2003.
- Iakovidou, O. (1995). The Female Gender in Greek Agrotourism. *Annals of Tourism Research*. 22(2), 481-484.
- Inskeep, E. (1991). *Tourism Planning and Integrated and Sustainable Development Approach*. New York: Van Nostrand Reinhold.
- Kemenparekraf. (2016). *Pedoman Pengembangan Desa Wisata*. Jakarta: Direktorat Pengembangan Destinasi Pariwisata.
- Leu, W. (1992). The Swiss Experience. Dalam: Nuryanti, editor. *Universal Tourism Enriching or Degrading Culture*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. pp 132-138.
- Mardikanto, T., Soebianto, P. (2012). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta.
- Naisbitt, J. (1995). *Global Paradox*. Jakarta: Binapura Aksara.
- Natori, M. (2001). *A Guide Book for Tourism-Based Community Development*. Yokohama: Asia Pacific Tourism Exchange Center.

- Oppermann, M. (1996). Rural Tourism in Southern Germany. *Annals of Tourism Research*. 23(1), 86-102.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisata Budaya Bali.
- Picard, M. (1996). *Bali Cultural Tourism and Touristic Culture*. Singapura: Archipelago Press.
- Pitana, I G. (1999). *Pelangi Pariwisata Bali*. Denpasar: PT Bali Post.
- Rajaratnam, S.D., Nair, V. (2015). Destination Quality and Tourist's Behavioural Intentions: Rural Tourist Destinations in Malaysia. *Journal Emerald Worldwide Hospitality and Tourism Themes*. 7(5), 463-472.
- Sammeng, A. M. (2000). *Cakrawala Pariwisata*. Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (tidak dipublikasikan).
- Suharto, E. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama.